

## **ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PENANGGUHAN FITUR LIVE TIKTOK SELAMA AKSI DEMONSTRASI 2025**

**Nurul Hikmah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

<sup>1</sup>[nurullhikmah10@gmail.com](mailto:nurullhikmah10@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan media sosial telah mengubah praktik komunikasi politik dan partisipasi publik dalam demokrasi digital. Platform digital tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kekuasaan dalam mengatur arus informasi melalui kebijakan dan infrastruktur teknologinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penangguhan fitur Live streaming TikTok membentuk praktik demokrasi digital di Indonesia serta bagaimana kontrol platform bekerja melalui infrastruktur digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) model Fairclough. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan observasi digital, kemudian dianalisis menggunakan tahapan Analisis Wacana Kritis Fairclough yang mencakup analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial hingga penarikan kesimpulan. Data penelitian terdiri atas dua artikel berita daring dan dua konten video TikTok yang merepresentasikan peristiwa penonaktifan fitur Live dalam konteks demonstrasi publik tahun 2025, dengan tingkat interaksi yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangguhan fitur Live tidak sekadar merupakan keputusan teknis, melainkan bentuk kontrol infrastruktur digital yang berdampak pada pembatasan partisipasi publik dan jurnalisme warga. Kontrol platform bekerja secara struktural dengan membatasi akses komunikasi real-time, sehingga membentuk ulang batas-batas demokrasi digital. Penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi dengan menegaskan pentingnya menganalisis fitur platform sebagai locus kekuasaan dalam masyarakat jaringan Indonesia.

**Kata Kunci:** demokrasi digital, TikTok, kontrol platform, analisis wacana kritis, jurnalisme warga

### **Abstract**

*The development of social media has transformed political communication practices and public participation within digital democracy. Digital platforms function not only as communication media but also as powerful actors that regulate information flows through policies and technological infrastructures. This study aims to analyze how the suspension of TikTok's Live feature shapes digital democratic practices in Indonesia and how platform control operates through digital infrastructure. This research adopts a qualitative approach using Fairclough's Critical Discourse Analysis. Data were collected through document analysis and digital observation, and subsequently analyzed across the dimensions of text, discursive practices, and social practices. The data consist of two online news articles and two TikTok video contents representing the deactivation of the Live feature during public demonstrations in 2025, all of which exhibit high levels of interaction. The findings reveal that the suspension of the Live feature is not merely a technical decision, but a form of digital infrastructure control that restricts public participation and citizen journalism. Platform control operates structurally by limiting real-time communication access, thereby reshaping the boundaries of digital democracy. This study contributes to communication studies by emphasizing the importance of examining platform features as key sites of power within Indonesia's network society.*

**Keywords:** digital democracy, TikTok, platform control, critical discourse analysis, citizen journalism

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik komunikasi politik dan konfigurasi ruang publik kontemporer. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, tetapi telah menjadi infrastruktur utama bagi partisipasi publik, pembentukan opini, dan artikulasi kepentingan politik warga. Dalam konteks ini, demokrasi digital sering dipahami sebagai perluasan ruang partisipasi yang memungkinkan warga terlibat secara lebih

luas, cepat, dan lintas batas melalui pemanfaatan teknologi komunikasi (Castells, 2010). Sejumlah studi menunjukkan bahwa platform digital mampu memfasilitasi diskusi publik, mempercepat mobilisasi sosial, serta membentuk kesadaran politik di berbagai konteks sosial dan politik.

Namun, optimisme terhadap demokrasi digital tidak terlepas dari kritik yang menyoroti peran platform media sosial sebagai aktor non-negara yang memiliki kekuasaan signifikan dalam mengatur sirkulasi informasi. Platform digital

beroperasi melalui seperangkat kebijakan, algoritma, dan desain teknis yang secara langsung mempengaruhi apa yang dapat dilihat, dibagikan, dan diakses oleh publik. Dengan demikian, ruang publik digital tidak sepenuhnya netral atau terbuka, melainkan dibentuk oleh logika ekonomi-politik platform yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi politik warga. Kondisi ini menempatkan platform media sosial sebagai aktor penting dalam dinamika demokrasi kontemporer, sejajar dan dalam beberapa kasus bahkan melampaui peran negara dan institusi media arus utama.

Dalam kajian komunikasi dan media, pergeseran ini telah dibahas melalui konsep masyarakat jaringan (*network society*) yang menekankan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern semakin ditentukan oleh kemampuan mengendalikan arus informasi dan konektivitas menurut Castells (2010). Perspektif ini menyoroti bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi juga melalui infrastruktur komunikasi yang mengatur siapa yang terhubung, bagaimana informasi mengalir, dan sejauh mana pesan dapat memperoleh visibilitas. Selain itu, perspektif budaya konvergensi menekankan bahwa partisipasi pengguna di media digital berlangsung dalam relasi yang tidak sepenuhnya setara dengan pemilik platform, karena aktivitas partisipatif tersebut tetap berada dalam kerangka kontrol teknologis dan kebijakan perusahaan media (Jenkins, 2006). Dengan demikian, partisipasi digital senantiasa berada dalam ketegangan antara potensi pemberdayaan dan praktik pengendalian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas relasi antara media sosial dan demokrasi digital dengan fokus pada partisipasi publik, mobilisasi politik, serta pembentukan ruang publik daring. Bennett dan Segerberg (2012), misalnya, menunjukkan bahwa media digital memungkinkan bentuk aksi kolektif yang lebih personal dan terdesentralisasi melalui logika *connective action*. Papacharissi (2015) menambahkan bahwa partisipasi digital tidak hanya digerakkan oleh rasionalitas politik, tetapi juga oleh afeksi, narasi personal, dan emosi kolektif yang membentuk *affective publics*. Dalam kerangka yang lebih kritis, Tufekci (2017) menegaskan bahwa partisipasi

berbasis platform memiliki kerentanan struktural karena sangat bergantung pada aturan, desain teknis, dan infrastruktur platform, sehingga perubahan kebijakan atau intervensi platform dapat secara langsung membentuk peluang serta batas-batas tindakan publik. Moderasi konten merupakan mekanisme utama yang digunakan platform digital untuk mengatur arus informasi dan membentuk wacana publik di ruang digital (Monaci, 2024).

Meski demikian, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung menempatkan platform sebagai medium yang memfasilitasi interaksi dan partisipasi, sementara dimensi kontrol infrastruktur yakni bagaimana fitur, kebijakan, dan desain teknis platform secara aktif membentuk praktik komunikasi politik seringkali kurang mendapat perhatian. Padahal, dalam masyarakat jaringan, kontrol atas infrastruktur komunikasi merupakan bentuk kekuasaan yang strategis karena menentukan visibilitas, kecepatan, dan jangkauan pesan politik di ruang publik digital.

Dalam konteks Indonesia, media sosial memiliki peran yang sangat menonjol dalam dinamika politik dan sosial. Tingginya tingkat penggunaan platform seperti TikTok, Instagram, dan X menjadikan media sosial sebagai arena utama pembentukan opini publik, terutama di kalangan generasi muda. Berbagai peristiwa politik dan sosial menunjukkan bahwa ruang digital di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai ruang kontestasi makna, legitimasi, dan kekuasaan. Penelitian Pamungkas dan Octaviani (2017), misalnya, menunjukkan bahwa komunikasi daring dapat berkelindan dengan dinamika luring, sehingga media sosial berfungsi sebagai arena artikulasi kepentingan dan pembentukan ruang publik yang berdampak langsung pada praktik sosial dan politik. TikTok tidak hanya berfungsi sebagai platform hiburan, tetapi juga sebagai ruang produksi wacana publik di mana pengguna dapat membangun narasi tandingan terhadap praktik dominan di ruang digital (Kulau & Zarkasi, 2025).

Studi lain dalam konteks komunikasi politik digital Indonesia menegaskan bahwa platform digital merupakan arena produksi makna politik yang aktif. Iskandar dkk. (2025), melalui kajian

wacana politik pada tagar #nazarpemilu, menunjukkan bahwa media sosial tidak sekadar merekam opini publik, tetapi turut membentuk realitas politik yang dinegosiasikan oleh pengguna melalui bahasa, simbol, dan narasi. Meski demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih menempatkan platform sebagai medium diskursif, sementara aspek kontrol infrastruktur terutama melalui fitur dan kebijakan teknis belum menjadi fokus utama analisis empiris.

Kajian mengenai TikTok di Indonesia sendiri masih didominasi oleh topik budaya populer, pemasaran digital, dan strategi komunikasi kreatif. Dimensi politik TikTok sebagai platform global yang mengelola ruang publik digital relatif kurang mendapat perhatian. Padahal, beberapa studi mulai menunjukkan bahwa TikTok dapat berfungsi sebagai arena produksi wacana dan kontestasi makna. Kulau dan Zarkasi (2025) dalam *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi (UNY)*, misalnya, membahas gerakan deinfluencing di TikTok sebagai bentuk counter-discourse terhadap budaya konsumerisme digital. Studi ini menegaskan bahwa TikTok tidak hanya menjadi kanal hiburan, tetapi juga ruang komunikasi publik tempat wacana tandingan diproduksi dan disirkulasikan. Media sosial berfungsi sebagai arena kontestasi makna di mana pengguna tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga merefleksikan nilai moral dan posisi politik melalui praktik komunikasi digital (Pratama, 2025).

Sementara itu, Pratama (2025) dalam jurnal yang sama menganalisis respons netizen terhadap isu #IndonesiaGelap melalui konsep moral mirroring, menunjukkan bahwa isu politik kontemporer di ruang digital dapat dipahami sebagai kontestasi nilai dan legitimasi. Kedua studi ini menegaskan relevansi TikTok sebagai objek kajian komunikasi, sekaligus membuka ruang untuk pendalaman terhadap dimensi kuasa platform dalam mengatur partisipasi publik.

Dalam lanskap tersebut, penangguhan fitur Live TikTok dalam konteks demonstrasi publik pada tahun 2025 menjadi kasus penting untuk memahami bagaimana kontrol platform bekerja secara konkret dalam demokrasi digital Indonesia. Fitur Live selama ini memungkinkan komunikasi real-time yang memberi ruang bagi

warga untuk menyaksikan, mendokumentasikan, dan menyebarkan peristiwa sosial secara langsung. Dalam konteks peristiwa politik dan demonstrasi, fitur ini berfungsi sebagai sarana penting bagi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, penangguhan fitur Live tidak hanya bersifat teknis, tetapi memiliki implikasi politis terhadap akses informasi dan praktik komunikasi publik. Platform digital tidak lagi hanya menjadi medium distribusi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai gatekeeper yang mengatur visibilitas dan sirkulasi konten melalui mekanisme moderasi platform (Gillespie, 2020).

Penangguhan fitur juga menunjukkan bentuk kontrol yang berbeda dari moderasi konten berbasis penghapusan unggahan individual. Jika penghapusan konten menasar unit pesan tertentu, penangguhan fitur menasar kemampuan dasar pengguna untuk berpartisipasi dalam komunikasi publik secara langsung. Dalam konteks demokrasi digital, tindakan semacam ini berpotensi membentuk ulang batas-batas partisipasi publik dan memengaruhi distribusi visibilitas informasi, terutama pada momen-momen krusial ketika informasi real-time sangat dibutuhkan oleh publik.

Meskipun isu moderasi konten dan tata kelola platform telah banyak dibahas dalam literatur internasional, kajian yang secara spesifik menelaah penangguhan fitur sebagai bentuk kontrol infrastruktur platform dalam konteks demokrasi digital Indonesia masih terbatas. Banyak penelitian berfokus pada analisis konten, perilaku pengguna, atau dampak media sosial terhadap opini publik, sementara peran fitur platform sebagai instrumen kekuasaan belum banyak dieksplorasi sebagai objek analisis utama. Celah inilah yang menjadi pijakan penelitian ini. Platform media sosial tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai aktor tata kelola yang mengatur arus informasi melalui kebijakan dan infrastruktur teknologinya (DeNardis & Hackl, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada penangguhan fitur Live TikTok sebagai praktik kontrol platform dalam konteks demokrasi digital Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis bagaimana penangguhan fitur tersebut merefleksikan relasi kekuasaan antara platform, negara, dan warga, serta bagaimana implikasinya terhadap partisipasi publik dalam masyarakat jaringan. Secara khusus, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian: (1) bagaimana penangguhan fitur Live TikTok membentuk praktik demokrasi digital di Indonesia? dan (2) bagaimana kontrol platform bekerja melalui infrastruktur digital dalam konteks penangguhan tersebut?

Berbeda dari studi yang menekankan partisipasi pengguna atau mobilisasi daring, artikel ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada penangguhan fitur platform sebagai bentuk kontrol infrastruktur digital yang secara langsung membentuk batas-batas demokrasi digital dalam masyarakat jaringan Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis untuk menganalisis praktik kontrol platform dalam konteks demokrasi digital. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen dan observasi digital terhadap dua artikel berita daring dan dua konten video TikTok yang merepresentasikan penangguhan fitur Live TikTok dalam konteks demonstrasi publik tahun 2025. Pemilihan data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat interaksi yang tinggi serta relevansinya dengan isu demokrasi digital, kebebasan berekspresi, dan jurnalisme warga.

Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) model Fairclough yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak netral. Proses analisis mencakup tiga dimensi utama, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pada dimensi teks, analisis diarahkan pada pilihan bahasa, representasi aktor, serta elemen visual dan narasi yang muncul dalam artikel berita dan konten TikTok. Pada dimensi praktik diskursif, penelitian menelaah proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana penangguhan fitur Live. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, temuan analisis dihubungkan dengan konteks relasi kuasa antara platform digital, negara, dan warga dalam demokrasi digital Indonesia.

Seluruh tahapan analisis dilakukan secara interpretatif dan literatif hingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai penangguhan fitur Live TikTok sebagai bentuk kontrol infrastruktur digital yang membentuk batas-batas partisipasi publik dan praktik jurnalisme warga.

Objek penelitian ini adalah wacana penangguhan fitur Live TikTok dalam konteks demonstrasi publik tahun 2025. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) dua video TikTok yang membahas atau merepresentasikan penangguhan fitur Live TikTok dalam konteks demonstrasi; (2) dua artikel berita daring yang melaporkan atau mengulas peristiwa penangguhan fitur tersebut. Pemilihan data dilakukan secara purposive, dengan kriteria konten memiliki tingkat interaksi yang tinggi, ditunjukkan melalui jumlah tayangan, komentar, dan respons pengguna; konten secara eksplisit mengaitkan penangguhan fitur live dengan isu demokrasi, kebebasan berekspresi, atau kontrol platform; konten merepresentasikan perdebatan publik yang berkembang di ruang digital.

Penggunaan dua video TikTok dan dua artikel berita dipandang memadai dalam kerangka CDA, karena fokus penelitian terletak pada kedalaman analisis wacana, bukan pada kuantitas data.

Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui teknik studi dokumen dan observasi digital. Video TikTok dan artikel berita dikumpulkan dengan melakukan penelusuran arsip digital berdasarkan kata kunci yang relevan dengan peristiwa penangguhan fitur Live TikTok. Setiap data utama didokumentasikan dalam bentuk screenshot, yang mencakup visual video, teks caption, potongan komentar, serta informasi interaksi seperti jumlah tayangan dan komentar.

Penggunaan screenshot bertujuan untuk menjaga keterlacakan data serta menyediakan bukti empirik yang dapat diverifikasi. Screenshot juga memungkinkan peneliti menganalisis elemen visual dan tekstual secara simultan, sesuai dengan karakter media digital yang bersifat multimodal.

Teknik Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi teks dan elemen visual yang relevan dalam video TikTok dan artikel berita.

Kedua, peneliti menganalisis penggunaan bahasa, representasi aktor, serta narasi dominan dan tandingan yang muncul dalam teks. Ketiga, peneliti menelaah praktik diskursif dengan memperhatikan bagaimana konten diproduksi, disebar, dan dikonsumsi oleh publik digital. Keempat, hasil analisis ditempatkan dalam konteks praktik sosial yang lebih luas untuk memahami implikasi penangguhan fitur terhadap relasi kuasa dan demokrasi digital. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan wacana yang muncul dalam konten TikTok dan artikel berita. Selain itu, konsistensi penggunaan kerangka teoritis dan metode analisis juga digunakan untuk memastikan validitas interpretasi. Keterlacakan data dijaga melalui dokumentasi screenshot dan pencatatan konteks pengambilan data, sehingga proses analisis dapat ditelusuri secara transparan.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan mengenai bagaimana penangguhan fitur Live TikTok direpresentasikan dan dimaknai dalam wacana media daring, serta bagaimana praktik diskursif tersebut merefleksikan relasi kuasa dalam demokrasi digital Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan Analisis Wacana Kritis (CDA) model Fairclough, yang mencakup tiga dimensi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data utama dalam bab ini terdiri atas dua artikel berita daring, yaitu artikel dari situs resmi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan artikel dari CNN Indonesia, yang keduanya membahas peristiwa penonaktifan fitur Live TikTok dalam konteks demonstrasi publik tahun 2025.

#### Representasi Penangguhan Fitur Live TikTok pada Level Teks

Hasil analisis menunjukkan adanya dua pola representasi utama dalam wacana media daring terkait penangguhan fitur Live TikTok selama demonstrasi publik tahun 2025. Pola pertama merepresentasikan penangguhan fitur sebagai bentuk pembatasan terhadap jurnalisme warga, sementara pola kedua membingkainya sebagai tindakan preventif yang bersifat sukarela demi menjaga stabilitas dan keamanan publik. Kedua

pola ini muncul secara kontras dalam artikel berita yang dianalisis, yaitu artikel dari situs resmi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan CNN Indonesia.

Penangguhan Fitur sebagai “Pembatasan Jurnalisme Warga” dalam Wacana UGM

Artikel berita UGM secara konsisten merepresentasikan penangguhan fitur Live TikTok sebagai tindakan yang berdampak pada pembatasan jurnalisme warga. Hal ini terlihat dari penggunaan diksi seperti “dinonaktifkan” dan “pembatasan”, yang mengonstruksi relasi kuasa asimetris antara platform digital dan warga. Istilah “jurnalisme warga” digunakan sebagai penanda utama untuk menekankan fungsi fitur Live sebagai sarana dokumentasi, pengawasan publik, dan penyebaran informasi secara real-time dalam konteks demonstrasi.



Gambar 3.1. Laman berita UGM

Secara tekstual, artikel UGM menempatkan akademisi komunikasi sebagai sumber utama, yang memberikan legitimasi epistemik terhadap kritik atas kebijakan platform. Dengan menghadirkan suara dosen komunikasi, artikel ini membangun otoritas keilmuan untuk menilai tindakan TikTok bukan sekadar sebagai keputusan teknis, melainkan sebagai praktik yang berdampak pada kebebasan berekspresi dan transparansi informasi. Representasi ini memperkuat posisi warga sebagai subjek yang dirugikan, sementara platform digital diposisikan sebagai aktor dominan yang

memiliki kontrol atas infrastruktur komunikasi publik.

Penggunaan istilah “unjuk rasa” dalam judul dan isi artikel juga penting secara diskursif, karena menempatkan peristiwa tersebut dalam ranah politik dan hak sipil. Dengan demikian, penonaktifan fitur Live tidak dipahami sebagai bagian dari manajemen konten biasa, melainkan sebagai intervensi terhadap praktik komunikasi politik warga. Pada level teks, artikel UGM secara konsisten menegaskan bahwa fitur Live memiliki fungsi sosial yang melampaui hiburan, yakni sebagai sarana dokumentasi, pengawasan publik, dan partisipasi demokratis.

### **Penangguhan Fitur sebagai “Tindakan Sukarela” dalam Wacana CNN Indonesia**

Berbeda dengan artikel UGM, artikel CNN Indonesia berjudul “Menkomdigi Klaim TikTok Sukarela Matikan Fitur Live saat Demo Memanas” menghadirkan framing yang lebih netral dan cenderung defensif terhadap platform. Pilihan kata “klaim” dan “sukarela” berfungsi untuk mengurangi kesan koersif dari tindakan TikTok, serta mengalihkan fokus dari isu pembatasan kebebasan berekspresi ke aspek keamanan dan stabilitas. Dalam wacana ini, penonaktifan fitur Live diposisikan sebagai respons preventif terhadap situasi demonstrasi yang “memanas”, bukan sebagai bentuk kontrol struktural atas partisipasi publik.



Gambar 3.2 Laman berita CNN

Secara tekstual, CNN Indonesia menempatkan pernyataan pejabat negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Digital sebagai sumber utama. Hal ini menciptakan relasi diskursif di mana negara dan platform tampil sebagai aktor rasional yang bertindak demi kepentingan publik. Dengan demikian, warga tidak diposisikan sebagai subjek aktif yang hak komunikasinya dibatasi, melainkan sebagai potensi risiko yang perlu dikelola demi keamanan. Framing ini secara implisit

menormalkan penangguhan fitur sebagai tindakan yang dapat diterima dalam situasi tertentu.

Perbedaan representasi antara artikel UGM dan CNN Indonesia menunjukkan bagaimana pilihan bahasa dan sumber memengaruhi makna kebijakan platform. Jika artikel UGM menekankan dimensi hak dan demokrasi, CNN Indonesia lebih menonjolkan narasi stabilitas dan pengelolaan risiko. Pada level teks, perbedaan ini mencerminkan dua logika wacana yang berlawanan dalam memahami peran platform digital dalam ruang publik.

### **Praktik Diskursif: Produksi dan Sirkulasi Wacana Penangguhan Fitur**

Pada dimensi praktik diskursif, analisis difokuskan pada bagaimana wacana penangguhan fitur Live TikTok diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui media daring. Artikel UGM dan CNN Indonesia tidak hanya merepresentasikan peristiwa, tetapi juga berpartisipasi dalam pembentukan pemahaman publik mengenai legitimasi tindakan platform. Artikel UGM diproduksi dalam konteks institusional akademik, dengan tujuan memberikan perspektif kritis dan reflektif terhadap isu komunikasi publik. Praktik diskursif ini menempatkan akademisi sebagai watchdog normatif yang menilai dampak kebijakan digital terhadap demokrasi. Sirkulasi wacana melalui kanal resmi universitas juga mengindikasikan upaya untuk mengintervensi diskursus publik dengan perspektif ilmiah, bukan sekadar melaporkan peristiwa.

Sebaliknya, CNN Indonesia sebagai media arus utama beroperasi dalam logika jurnalisme profesional yang mengutamakan pernyataan resmi dan otoritas negara. Praktik diskursif ini cenderung mereproduksi narasi institusional yang menekankan stabilitas dan keamanan, sehingga membingkai penonaktifan fitur sebagai tindakan rasional dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, peran platform digital tidak dipertanyakan secara kritis, melainkan diterima sebagai bagian dari tata kelola ruang publik digital.

Perbedaan praktik diskursif ini berdampak pada cara audiens memahami peristiwa. Artikel UGM mendorong pembaca untuk melihat penangguhan fitur sebagai masalah demokrasi dan kebebasan berekspresi, sementara CNN

Indonesia mengarahkan pembaca pada pemaknaan yang lebih pragmatis dan depolitisasi. Dengan demikian, praktik diskursif media berkontribusi pada fragmentasi pemahaman publik mengenai relasi kuasa antara platform, negara, dan warga.

### **Praktik Sosial: Kontrol Infrastruktur Platform dalam Demokrasi Digital**

Pada dimensi praktik sosial, penangguhan fitur Live TikTok dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih luas dalam demokrasi digital Indonesia. Fitur Live sebagai infrastruktur komunikasi memungkinkan dokumentasi peristiwa secara real-time, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik dan jurnalisme warga. Penonaktifan fitur tersebut, sebagaimana direpresentasikan dalam kedua artikel, menunjukkan bagaimana kontrol atas infrastruktur digital dapat membatasi atau membentuk praktik komunikasi politik warga. Dalam kerangka masyarakat jaringan (Castells, 2010), kontrol atas jaringan dan infrastruktur informasi merupakan sumber kekuasaan yang strategis. Penangguhan fitur Live mencerminkan kemampuan platform untuk mengintervensi arus informasi secara langsung, terutama pada momen politik yang krusial. Praktik ini menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh partisipasi pengguna, tetapi juga oleh keputusan teknologis dan kebijakan platform global yang beroperasi dalam konteks lokal.

Lebih jauh, perbedaan wacana antara artikel UGM dan CNN Indonesia menunjukkan adanya kontestasi makna mengenai legitimasi kontrol platform. Wacana “pembatasan jurnalisme warga” merepresentasikan resistensi terhadap dominasi platform, sementara wacana “tindakan sukarela demi keamanan” merepresentasikan normalisasi kontrol tersebut. Kontestasi ini mencerminkan ketegangan antara logika demokrasi dan logika tata kelola platform dalam ruang publik digital.

Implikasi sosial dari praktik ini adalah pergeseran batas-batas demokrasi digital, di mana akses terhadap fitur komunikasi real-time dapat dibatasi atas dasar keamanan atau stabilitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai siapa yang berhak menentukan batas tersebut dan berdasarkan logika apa. Dalam konteks ini, penangguhan fitur Live

TikTok tidak hanya berdampak pada praktik komunikasi, tetapi juga pada relasi kuasa antara warga, negara, dan platform digital.

### **Sintesis Pembahasan: Dari Moderasi Konten ke Kontrol Infrastruktur**

Hasil analisis menunjukkan bahwa penangguhan fitur Live TikTok direpresentasikan secara berbeda oleh media daring, mencerminkan perbedaan orientasi diskursif dan kepentingan institusional. Artikel UGM mengartikulasikan kritik normatif terhadap pembatasan jurnalisme warga, sementara CNN Indonesia mereproduksi narasi stabilitas dan pengelolaan risiko. Perbedaan ini menegaskan bahwa kontrol platform tidak hanya bekerja melalui kebijakan teknis, tetapi juga melalui produksi dan sirkulasi wacana yang membingkai tindakan tersebut sebagai sah atau problematis.

Dengan menggunakan CDA Fairclough, penelitian ini menunjukkan bahwa penangguhan fitur merupakan bentuk kontrol infrastruktur digital yang memiliki implikasi langsung terhadap demokrasi digital. Berbeda dari moderasi konten yang berfokus pada penghapusan pesan individual, kontrol infrastruktur bekerja pada level yang lebih mendasar, yakni menentukan kemungkinan partisipasi itu sendiri. Temuan ini memperluas pemahaman tentang peran platform digital dalam demokrasi, dengan menempatkan fitur teknologis sebagai locus kekuasaan yang krusial.

### **Penangguhan Fitur sebagai Gangguan terhadap Akses Informasi Real-Time**

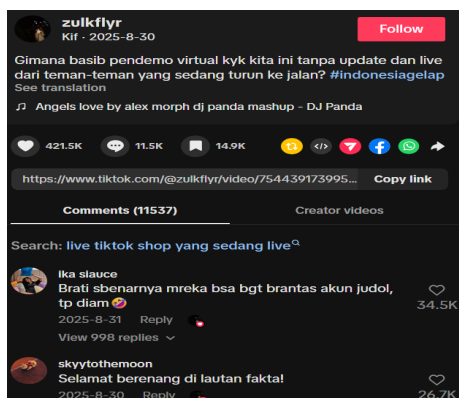
Video TikTok yang diunggah oleh akun @zulkflyr merepresentasikan peristiwa demonstrasi publik melalui sudut pandang warga yang berada langsung di lokasi kejadian. Secara visual, video menampilkan kerumunan massa pada malam hari dengan situasi jalanan yang padat, suara latar kebisingan, serta gestur kolektif yang menunjukkan intensitas aksi. Di bagian atas video, terdapat teks naratif “Ngeblokir live tiktok dalam sekejap, giliran memberantas judul syulit” yang secara eksplisit menyampaikan kritik terhadap kebijakan platform. Pilihan diksi “ngeblokir” dan “dalam sekejap” merepresentasikan tindakan penangguhan sebagai intervensi mendadak dan

sepihak, sementara frasa “syulit” (sulit) mengandung ironi yang membandingkan ketegasan platform dalam menonaktifkan fitur Live dengan lemahnya penanganan isu lain.



Gambar 3.3. Konten TikTok @zulkflyr

Pada level teks, bahasa yang digunakan bersifat informal, satiris, dan konfrontatif, yang mencerminkan karakter wacana warga di media sosial. Teks ini tidak hanya berfungsi sebagai keterangan visual, tetapi juga sebagai alat artikulasi kritik politik terhadap platform dan, secara implisit, terhadap otoritas yang dianggap berkolaborasi dengan platform. Dengan demikian, video ini menampilkan fitur Live sebagai sarana penting bagi warga untuk memperoleh informasi real-time dan mengekspresikan kritik terhadap kekuasaan.



Gambar 3.4. Komentar pada konten TikTok

Komentar-komentar yang muncul pada video tersebut memperkuat konstruksi wacana ini. Respons seperti “Berarti sebenarnya mereka bisa banget berantas akun judul, tapi diam” menunjukkan bahwa audiens tidak hanya mengonsumsi konten secara pasif, tetapi juga

melakukan penafsiran kritis terhadap kebijakan platform. Tingginya jumlah tayangan dan komentar menandakan bahwa wacana penangguhan fitur Live memperoleh resonansi luas di ruang publik digital, sehingga video ini berfungsi sebagai titik artikulasi kekecewaan kolektif terhadap praktik kontrol platform.

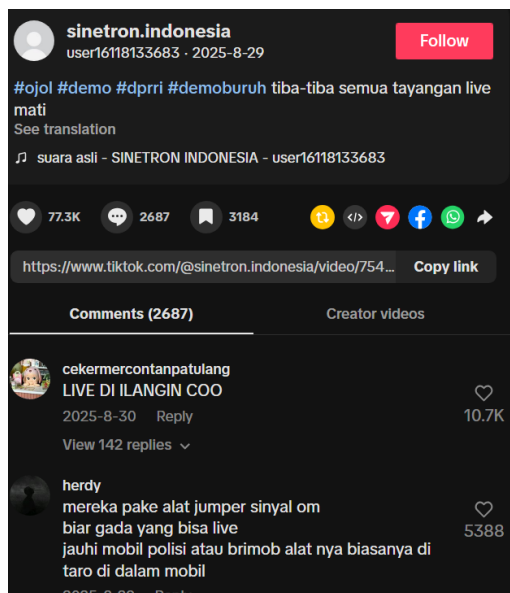
### **Penangguhan Fitur sebagai Pengalaman Kolektif Kehilangan Akses**

Video kedua yang diunggah oleh akun @sinetron.indonesia merepresentasikan penangguhan fitur Live sebagai pengalaman kolektif yang dialami secara simultan oleh banyak pengguna. Teks visual “02.40 tiba-tiba semua live mati” menekankan aspek temporal dan mendadak dari peristiwa tersebut. Penanda waktu “02.40” berfungsi sebagai bukti empiris sekaligus simbol bahwa penangguhan terjadi secara serentak, bukan sebagai akibat dari pelanggaran individual oleh pengguna tertentu. Secara visual, video ini menampilkan situasi demonstrasi yang semakin intens, dengan elemen asap, api, dan pergerakan massa yang dinamis. Ketika dikaitkan dengan teks “tiba-tiba semua live mati”, visual tersebut mengonstruksi makna bahwa publik kehilangan akses untuk menyaksikan dan mendokumentasikan peristiwa krusial secara langsung. Pada level teks, penggunaan frasa “semua live” menggeneralisasi pengalaman individu menjadi pengalaman kolektif, sehingga penangguhan fitur dipahami sebagai praktik struktural, bukan insiden teknis yang terisolasi.

Komentar audiens pada video ini juga menunjukkan spekulasi dan kecurigaan terhadap mekanisme penangguhan. Komentar seperti “LIVE DI ILANGIN COO” dan dugaan penggunaan alat pengacak sinyal mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap narasi resmi. Wacana spekulatif ini penting secara diskursif karena menunjukkan bagaimana kekosongan informasi akibat penangguhan fitur mendorong produksi makna alternatif di kalangan warga. Dalam konteks CDA, hal ini menunjukkan bahwa kontrol atas infrastruktur komunikasi tidak menghentikan produksi wacana, tetapi justru memindahkannya ke ranah spekulasi dan kecurigaan.



Gambar 3.5. Konten TikTok @sinetron.Indonesia



(Gambar 3.6. Komentar pada konten TikTok)

### **Praktik Diskursif: Produksi, Sirkulasi, dan Negosiasi Wacana di TikTok**

Pada dimensi praktik diskursif, kedua video TikTok tersebut menunjukkan bagaimana warga memanfaatkan platform sebagai ruang dokumentasi, ekspresi, dan negosiasi makna atas peristiwa politik. Video diproduksi secara spontan, tanpa mediasi institusional, dan disirkulasikan melalui algoritma TikTok yang memungkinkan penyebaran cepat ke audiens luas. Praktik ini menempatkan pengguna sebagai produsen wacana (producers), sekaligus konsumen yang aktif berinteraksi melalui komentar.

Penangguhan fitur Live secara langsung mempengaruhi praktik diskursif ini. Ketika fitur

Live dinonaktifkan, alur produksi dan distribusi wacana real-time terputus, sehingga warga beralih ke bentuk dokumentasi pasca-peristiwa, seperti unggahan video pendek dan narasi retrospektif. Pergeseran ini menunjukkan bahwa kontrol platform tidak hanya membatasi visibilitas konten, tetapi juga mengubah cara warga merekam, membingkai, dan menyebarkan peristiwa sosial.

Interaksi yang tinggi pada kedua video ditunjukkan melalui jumlah tayangan, komentar, dan respons emosional menandakan bahwa meskipun fitur Live dinonaktifkan, kebutuhan publik akan informasi real-time tetap tinggi. Dengan demikian, praktik diskursif di TikTok memperlihatkan ketegangan antara logika partisipasi warga dan logika kontrol platform, di mana warga terus berupaya mempertahankan ruang ekspresi meskipun infrastruktur komunikasi dibatasi.

### **Praktik Sosial: Dari Jurnalisme Warga ke Kontrol Infrastruktur Digital**

Pada dimensi praktik sosial, analisis terhadap video TikTok ini menunjukkan bahwa penangguhan fitur Live berdampak langsung pada praktik jurnalisme warga. Fitur Live berfungsi sebagai sarana utama bagi warga untuk mendokumentasikan peristiwa sosial secara langsung, terutama dalam situasi demonstrasi yang memiliki implikasi politik. Penonaktifan fitur tersebut mengindikasikan pergeseran batas-batas jurnalisme warga, dari praktik yang relatif otonom menjadi praktik yang sangat bergantung pada keputusan platform.

Dalam kerangka masyarakat jaringan Castells (2010), kontrol atas infrastruktur komunikasi merupakan bentuk kekuasaan yang strategis karena menentukan arus informasi dan visibilitas publik. Penangguhan fitur Live TikTok menunjukkan bahwa platform memiliki kapasitas untuk mengintervensi komunikasi publik secara langsung, terutama pada momen politik yang sensitif. Praktik ini memperlihatkan bagaimana demokrasi digital dibentuk tidak hanya oleh partisipasi warga, tetapi juga oleh kebijakan teknologis platform global.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat argumen bahwa kontrol platform tidak selalu bekerja melalui penghapusan konten individual, tetapi

melalui pengaturan infrastruktur yang membentuk kemungkinan partisipasi itu sendiri. Dengan demikian, penangguhan fitur Live dapat dipahami sebagai bentuk kontrol infrastruktur digital yang berdampak sistemik terhadap praktik komunikasi dan demokrasi digital di Indonesia.

### **Sintesis Analisis: TikTok sebagai Arena Kontestasi Kuasa**

Integrasi analisis artikel berita dan video TikTok menunjukkan adanya kontestasi wacana mengenai penangguhan fitur Live TikTok. Jika media arus utama dan institusi negara cenderung membingkai penangguhan sebagai tindakan sukarela atau preventif, konten warga di TikTok merepresentasikan pengalaman langsung kehilangan akses komunikasi dan memproduksi kritik terhadap platform. Perbedaan ini menegaskan bahwa demokrasi digital merupakan arena kontestasi kuasa yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan posisi yang berbeda.

### **Pembahasan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penangguhan fitur Live TikTok tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai bentuk kontrol infrastruktur digital yang membentuk batas-batas partisipasi publik. Dalam kerangka masyarakat jaringan, Castells (2010) menegaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat digital bekerja melalui kemampuan mengendalikan arus informasi dan konektivitas. Temuan ini sejalan dengan Kulau dan Zarkasi (2025) yang menunjukkan bahwa konten TikTok dapat menjadi arena produksi counter-discourse, di mana pengguna menegosiasikan dan menantang struktur makna yang dominan di ruang digital. Penangguhan fitur Live menunjukkan bagaimana platform digital memiliki kapasitas untuk mengintervensi komunikasi publik secara langsung, terutama pada momen politik yang krusial. Berbeda dari moderasi konten yang berfokus pada penghapusan pesan individual, kontrol infrastruktur bekerja pada level yang lebih mendasar dengan menentukan kemungkinan partisipasi itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan Tufekci (2017) yang menyoroti kerentanan struktural gerakan dan partisipasi

berbasis platform terhadap perubahan kebijakan dan desain teknologi platform.

Pembingkaiian penangguhan fitur Live sebagai pembatasan jurnalisme warga dalam wacana media dan konten TikTok menunjukkan bahwa fitur platform memiliki peran sentral dalam praktik dokumentasi dan pengawasan publik. Dalam budaya konvergensi, Jenkins (2006) menekankan bahwa partisipasi pengguna selalu berada dalam struktur yang dikontrol oleh pemilik platform. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa ketika infrastruktur komunikasi real-time dibatasi, praktik jurnalisme warga mengalami penyempitan ruang. Hal ini berdampak pada berkurangnya visibilitas peristiwa sosial serta melemahnya kapasitas warga untuk berpartisipasi secara langsung dalam ruang publik digital, terutama dalam konteks demonstrasi dan aksi kolektif. Temuan ini memperkuat argumen Gillespie (2020) bahwa kontrol platform tidak hanya terjadi melalui penghapusan konten, tetapi melalui desain sistem moderasi yang menentukan skala visibilitas informasi di platform digital.

Melalui Analisis Wacana Kritis model Fairclough, penelitian ini memperlihatkan bahwa penangguhan fitur Live TikTok tidak sekadar berfungsi sebagai kebijakan teknis, tetapi sebagai praktik diskursif yang mereproduksi relasi kuasa dalam demokrasi digital. Pada level teks dan praktik diskursif, perbedaan framing antara media institusional, media arus utama, dan konten warga menunjukkan bagaimana tindakan penangguhan dilegitimasi, dinegosiasikan, atau dipersoalkan melalui bahasa. Pada level praktik sosial, temuan ini mengindikasikan bahwa kontrol platform bekerja melalui pengaturan infrastruktur komunikasi yang menentukan kemungkinan partisipasi real-time.

Dalam kerangka masyarakat jaringan, kontrol atas konektivitas dan arus informasi merupakan bentuk kekuasaan strategis (Castells), sehingga pembatasan fitur bukan hanya membatasi konten, tetapi membatasi kondisi partisipasi itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini menggeser fokus analisis dari moderasi konten menuju kontrol fitur sebagai locus kekuasaan yang membentuk konfigurasi demokrasi digital di Indonesia. Moderasi konten berbasis

algoritma menunjukkan bahwa platform digital memiliki peran penting dalam mengatur arus informasi dan visibilitas konten dalam ruang publik digital (Gorwa et al., 2020).

Meskipun demikian, penelitian ini tetap memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, jumlah data yang dianalisis terbatas pada dua artikel berita daring dan dua konten video TikTok, sehingga temuan penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas. Meskipun pendekatan Analisis Wacana Kritis menekankan kedalaman interpretasi dibandingkan kuantitas data, perluasan sumber data pada penelitian selanjutnya dapat memperkaya variasi representasi dan dinamika wacana yang muncul di ruang publik digital. Dalam masyarakat platform, perusahaan teknologi memiliki kapasitas untuk membentuk nilai publik dan praktik komunikasi melalui desain sistem serta kebijakan platform (van Dijck et al., 2021).

Kedua, penelitian ini berfokus pada analisis teks dan praktik diskursif tanpa melibatkan wawancara langsung dengan aktor platform, pembuat kebijakan, maupun jurnalisme warga. Oleh karena itu, dimensi kebijakan internal platform dan proses pengambilan keputusan teknologis belum dapat diungkap secara mendalam. Penelitian mendatang dapat mengombinasikan pendekatan wacana kritis dengan etnografi digital, wawancara mendalam, atau analisis kebijakan platform untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontrol infrastruktur digital. Penangguhan fitur komunikasi real-time dapat dipahami sebagai bentuk perluasan praktik moderasi platform yang bekerja pada level infrastruktur komunikasi (Monaci, 2024). Secara praktis, temuan penelitian ini mengindikasikan pentingnya transparansi kebijakan fitur platform, khususnya dalam situasi politik yang sensitif. Bagi pengembangan kajian komunikasi digital, penelitian ini membuka peluang untuk mengeksplorasi lebih lanjut relasi antara kontrol fitur platform, regulasi negara, dan strategi adaptif pengguna dalam mempertahankan partisipasi publik di ruang digital.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan bahwa penangguhan fitur Live TikTok dalam konteks demonstrasi publik 2025 merefleksikan pergeseran bentuk kontrol platform dari moderasi konten menuju pengaturan infrastruktur komunikasi itu sendiri. Melalui Analisis Wacana Kritis, ditemukan bahwa praktik tersebut direpresentasikan secara berbeda oleh aktor-aktor diskursif, media institusional mbingkainya sebagai pembatasan jurnalisme warga, media arus utama menormalkannya sebagai tindakan preventif yang rasional, sementara konten warga merekam pengalaman langsung kehilangan akses komunikasi real-time. Perbedaan representasi ini menunjukkan bahwa kontrol platform tidak hanya bekerja secara teknologis, tetapi juga dilegitimasi dan diperdebatkan melalui produksi wacana yang membentuk persepsi publik mengenai batas-batas partisipasi digital.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa fitur platform bukan sekadar elemen teknis, melainkan mekanisme kuasa yang menentukan kemungkinan komunikasi, visibilitas informasi, dan kapasitas warga untuk terlibat dalam ruang publik digital. Demokrasi digital dalam konteks ini tidak hanya bergantung pada keberadaan partisipasi, tetapi pada stabilitas akses terhadap infrastruktur komunikasi yang memungkinkan partisipasi tersebut terjadi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang relasi antara platform global, negara, dan masyarakat sipil dengan menunjukkan bahwa pembatasan fitur dapat berimplikasi sistemik terhadap praktik komunikasi publik, bahkan tanpa penghapusan konten secara langsung.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah dan jenis data yang dianalisis serta tidak mengakses perspektif internal platform atau pembuat kebijakan. Oleh karena itu, riset selanjutnya perlu memperluas cakupan data lintas platform dan mengintegrasikan pendekatan lain, seperti wawancara kebijakan atau etnografi digital, untuk menelaah lebih dalam mekanisme pengambilan keputusan dan respons adaptif pengguna. Kajian lanjutan juga penting untuk mengkaji bagaimana regulasi negara dan kebijakan platform saling berinteraksi dalam membentuk konfigurasi

kekuasaan di ruang publik digital Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data, baik dengan menambah variasi platform digital maupun melibatkan aktor lain seperti perwakilan platform, pembuat kebijakan, atau jurnalis warga. Penelitian mendatang juga dapat mengkombinasikan Analisis Wacana Kritis dengan metode lain, seperti etnografi digital atau wawancara, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik kontrol platform.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>

Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

CNN Indonesia. (2025, August 31). Menkomdigi klaim TikTok sukarela matikan fitur live saat demo memanas. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250831201802-185-1268561/menkomdigi-klaim-tiktok-sukarela-matikan-fitur-live-saat-demo-memanas>

DeNardis, L., & Hackl, A. M. (2015). Internet governance by social media platforms. *Telecommunications Policy*, 39(9), 761–770. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.04.003>

Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.  
Gillespie, T. (2020). Content moderation, AI, and the question of scale. *Big Data & Society*, 7(2), 1–5. <https://doi.org/10.1177/2053951720943234>

Gorwa, R., Binns, R., & Katzenbach, C. (2020). Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance. *Big Data & Society*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/2053951719897945>

Iskandar, D., Putri, A. R., & Mahendra, Y. P. (2025). Wacana politik digital dalam tagar #Nazarpemilu: Analisis komunikasi politik di media sosial. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 14(1), 45–60.

Kulau, A., & Zarkasi, A. (2025). Gerakan deinfluencing di TikTok sebagai counter-discourse terhadap budaya konsumerisme digital. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–15.

Monaci, S. (2024). The governance of disinformation: Everyday practices of content moderation. *International Journal of Communication*, 18, 1234–1252.

Pamungkas, C., & Octaviani, M. (2017). Aksi kolektif digital dan politik kewargaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3), 177–191. <https://doi.org/10.22146/jsp.28788>

Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.

Pratama, R. A. (2025). Moral mirroring dalam respons netizen terhadap isu #IndonesiaGelap di media sosial. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 16–30.

Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.

Universitas Gadjah Mada. (2025, September 3). Fitur live TikTok dinonaktifkan saat unjuk rasa, dosen komunikasi UGM sebut bentuk pembatasan jurnalisisme warga. <https://ugm.ac.id/id/berita/fitur-live-tiktok-dinonaktifkan-saat-unjuk-rasa-dosen-komunikasi-ugm-sebut-bentuk-pembatasan-jurnalisisme-warga/>

van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2021). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.